



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 4 SAROLANGUN



Jalan : Madinapura No. 138 Mandiagin, Kab. Sarolangun – Jambi Kode Pos 37492 telepon : 081373173738
Email : sma.negeri4.sarolangun@gmail.com blog : pelangimadinapura.blogspot.com

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
MATA PELAJARANEKONOM

KOMPETENSI DASAR : APBN DAN APBD

GURU PENGAMPU : R U M I A T I, S.E.

NAMA :

KELAS :

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat

01. Tujuan dari penyusunan APBN adalah....
 - A. Sebagai acuan atau pedoman penerimaan keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional
 - B. Sebagai acuan atau pedoman pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional
 - C. Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dikementerian dan lembaga-lembaga negara demi tercapainya tujuan pembangunan nasional
 - D. Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah daerah masing-masing dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional
 - E. Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional
02. Melalui APBN tercermin gambaran pembagian anggaran negara untuk setiap sektor dan wilayah pembangunan. Hal tersebut menunjukkan salah satu fungsi APBN yaitu yatu ...
 - A. Alokasi
 - B. Regulasi
 - C. Distribusi
 - D. Stabilisasi
 - E. evaluasi
03. Berikut pernyataan dari fungsi Otoritas adalah....
 - A. APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berikutnya
 - B. APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
 - C. APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada dua tahun yang bersangkutan
 - D. APBN menjadi dasar untuk merencanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
 - E. APBN menjadi hasil dari pelaksanaan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
04. APBN dalam proses penyusunannya melalui tahapan di bawah ini. Yang tidak termasuk tahapan penyusunan RAPBN adalah....
 - A. Pemerintah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- B. Pemerintah meminta Badan Pengawas Keuangan untuk menilai RAPBN
- C. Pemerintah mengajukan RAPBN kepada DPR untuk dibahas
- D. DPR membahas RAPBN dengan tujuan untuk diterima atau ditolak
- E. RAPBN akan disahkan menjadi APBN dan disampaikan kepada pemerintah yang dilaksanakan

05. Perhatikan komponen pendapatan berikut ini

- 1. Pajak penghasilan (PPH)
- 2. bagian laba dari BUMN
- 3. Cukai
- 4. Pungutan ekpor
- 5. Penerimaan dari pengelolaan SDA

Dari konponen penerimaan diatas yang termasuk penerimaan dalam negeri dari sektor perpajakan adalah nomor....

- A. 1, 2 dan 3
- B. 2, 3 dan 4
- C. 3, 4 dan 5
- D. 1, 3 dan 4
- E. 2, 4 dan 5

06. Bantuan umum yang digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dengan arahan pemerintah pusat disebut....

- A. Dana alokasi khusus
- B. Dana alokasi umum
- C. Dana talangan khusus
- D. Dana bantuan bencana
- E. Dana alokasi khusus

07. Tabel APBN selama 2 tahun sebagai berikut:

	Uraian	APBN-P 2014	APBN-P 2015
A	Pendapatan Negara dan Hibah	1.635.378,1	1.768.970,6
	1. Penerimaan Dalam Negeri	1.633.053,4	1.765.662,2
	2. Hibah	2.325,1	3.308,4
B	Belanja Negara	1.876.872,8	1994.888,7
	1. Belanja Pemerintah Pusat	1.280.368,6	1.330.766,8
	2. Transfer ke Daerah	596.504,2	664.121,9

Berdasarkan data tersebut, pernyataan berikut ini yang benar adalah...

- A. Pemerintah menerapkan surplus anggaran dengan dgn jumlah pendapatan lebih besar dari belanja
 - B. Pendapatan negara mengalami penurunan baik penerimaan dalam negeri maupun hibah
 - C. Anggaran negara dalam 2 tahun mengalami surplus anggaran disebabkan pendapatan lebih besar dari pengeluaran
 - D. Defisit anggaran tahun 2015 lebih besar dari tahun 2014 dikarenakan pengeluaran lebih besar dari pendapatan
 - E. Belanja negara mengalami peningkatan baik belanja pemerintah pusat maupun untuk transfer ke daerah
08. Jika disusun APBN dengan menggambarkan kondisi pemerintah harus meminjam dari bank sentral atau harus mencetak uang baru untuk membiayai pembangunan, maka kebijakan penyusunan APBN yang dianut adalah....
- A. Anggaran surplus
 - B. Anggaran dinamis
 - C. Anggaran berimbang
 - D. Anggaran defisit
 - E. Anggaran tidak dinamis
09. Pemerintah daerah membebaskan biaya pembuatan KTP bagi penduduknya kebijakan tersebut termasuk tujuan APBD dalam rangka...

- A. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana daerah
- B. Menciptakan rasa aman dan penegakan keadilan
- C. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- D. Meningkatkan lapangan pekerjaan
- E. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

10. Berikut ini yang tidak termasuk Pendapatan Asli Daerah adalah....

- A. Dana alokasi umum
- B. Pajak Daerah
- C. Retribusi Daerah
- D. Pajak hiburan
- E. Parkir

11. Belanja yang memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan daerah disebut....

- A. Belanja rutin
- B. Belanja pembangunan
- C. Belanja langsung
- D. Belanja tidak langsung
- E. Belanja pegawai

12. Pengeluaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- (1) Subsidi daerah otonom
- (2) Bunga dan cicilan utang
- (3) Bantuan sosial
- (4) Bantuan pembangunan pasar
- (5) Bantuan rehab sekolah dasar

Berdasarkan jenis pengeluaran diatas, yang termasuk pengeluaran pemerintah daerah ditunjukkan nomor

- A. (1), (2) dan (3)
- B. (1), (2) dan (4)
- C. (1), (2) dan (5)
- D. (2), (3) dan (4)
- E. (3), (4) dan (5)

13. Dana alokasi umum termasuk dalam

- A. Dana perimbangan
- B. Dana pembangunan
- C. Dana penyeimbang
- D. Dana otonomi daerah
- E. Dana bencana

14. Berikut yang tidak termasuk penghasilan asli daerah adalah....

- A. Retribusi parkir
- B. Pajak kendaraan
- C. Bea Balik nama
- D. Pajak restoran
- E. Pajak penghasilan

15. Dampak dari APBD terhadap perekonomian di suatu daerah adalah...

- A. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah
- B. Mampu mereduksi tingkat kemiskinan yang ada di suatu daerah secara signifikan.
- C. Mempengaruhi terhadap pengurangan atau penanggulangan masalah pengangguran
- D. Mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi
- E. Meningkatkan status sosial para penguasa dan pengelola daerah